

## Integrasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah



Oleh **DR. H. Asep Hilman, M.Pd.**  
Kepala Bidang Dikmenti  
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang terletak di antara lempeng tektonis Euro-Asia dan Australia-India serta sering erupsinya gunung berapi dan faktor manusia yang mengeksploitasi hutan secara berlebihan menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Hal ini diperburuk dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan mengakibatkan risiko bencana di Indonesia menjadi semakin tinggi seiring dengan kerap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui, bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka.

### Bencana Alam di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah rawan bencana alam di Indonesia. Terdapat 15 kabupaten/kota yang selalu menjadi langganan banjir dan tanah longsor. Daerah rawan banjir di Jawa Barat diantaranya, daerah Karawang, Indramayu, Ciamis, dan Kab. Bandung. Sedangkan daerah yang rawan longsor, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kab./Kota Bogor, dan Kab. Purwakarta.

Selain itu, Jawa Barat pun rentan terhadap gempa bumi. Misalnya, gempa bumi Jawa Barat 2009 atau yang lebih dikenal sebagai gempa bumi Tasikmalaya adalah gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 2 September 2009 pada pukul 14.55 WIB dengan pusat gempa di 142 km barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat yang berkekuatan 7,3 pada Skala Richter. Gempa tektonik tersebut terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa. Total puluhan ribu bangunan rumah maupun gedung perkantoran di Indramayu, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan mengalami kerusakan parah. Di Cianjur terjadi tanah longsor yang menyebabkan 11 rumah tertimbun.

*Last but not least*, jangan dilupakan pula banyaknya gunung berapi di Jawa Barat, seperti gunung: Ciremai, Galunggung, Gede, Guntur, Papandayan, Salak, dan Tangkuban Perahu yang sewaktu-waktu aktif dan dapat memuntahkan materialnya ke daerah-daerah sekitarnya serta menimbulkan bencana bagi masyarakatnya.

Tak pelak lagi bidang pendidikan pun terkena dampak bencana alam ini.

Ketika terjadi bencana alam, anak-anaklah yang paling rentan terkena dampaknya. Terutama sekali jika pada saat kejadian anak-anak tersebut sedang belajar di lingkungan sekolah. antara lain rusaknya fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan sekolah,

peralatan belajar, dan sebagainya, sehingga berpengaruh sekali terhadap terbatasnya pelayanan pembelajaran kepada peserta didik yang diberikan oleh sekolah.

Padahal mendapatkan layanan pembelajaran tidak hanya di daerah normal melainkan juga di daerah bencana alam, yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin konstitusi yang termaktub pada pasal 31, ayat (2) UUD 1945.

Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi tanpa adanya suatu upaya terencana dan tepat guna. Sebab seandainya hal seperti itu dibiarkan akan berdampak besar menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Jadi, diperlukan adanya suatu layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang disesuaikan dengan permasalahan serta situasi dan kondisi di daerah tersebut.

### **Pengurangan Resiko Bencana**

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai dengan diluncurkannya buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) oleh Bappenas dan Bakornas PB dan diterbitkannya UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia, dan diikuti dengan peraturan turunannya, serta pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Resiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang; dan dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan tema 'Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana' memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan resiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Bencana dapat diredam secara berarti jika masyarakat mempunyai informasi yang cukup dan didorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha antara lain:

- (1) menggalakkan dimasukkannya pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana sebagai bagian yang relevan dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dan anak-anak dengan informasi; menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana sebagai suatu elemen instrinsik dalam dekade 2005–2015 untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan (*United Nations Decade of Education for Sustainable Development*);
- (2) menggalakkan pelaksanaan penjajagan resiko tingkat lokal dan program kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan;
- (3) menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisasi efek bahaya;
- (4) mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu, misalnya: para perancang pembangunan, manajer tanggap darurat, pejabat pemerintah tingkat lokal, dan sebagainya;

- (5) menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarelawan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan mitigasi dan menghadapi bencana;
- (6) memastikan kesetaraan akses kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan bagi perempuan dan konstituen yang rentan; dan
- (7) menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan resiko bencana.

Masyarakat di seluruh dunia berpandangan bahwa anak-anak menghadirkan harapan masa depan. Sekolah dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap generasi muda, yaitu dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan menyampaikan pengetahuan tradisional dan konvensional kepada generasi muda. Untuk melindungi anak-anak dari ancaman bencana alam diperlukan dua prioritas berbeda namun tidak bisa dipisahkan aksinya yaitu pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Untuk alasan itulah dilakukan 'Kampanye Pendidikan tentang Resiko Bencana dan Keselamatan di Sekolah' yang dikoordinir oleh UN/ISDR (*United Nations/International Strategy for Disaster Reduction*) hingga penghujung tahun 2007 dengan didasari berbagai pertimbangan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama kejadian bencana, terutama yang sedang bersekolah pada saat berlangsungnya kejadian. Pada saat bencana, gedung sekolah hancur, mengurangi usia hidup murid sekolah dan guru yang sangat berharga dan macetnya kesempatan memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana. Pembangunan kembali sekolah memerlukan waktu yang tidak sebentar dan pastilah sangat mahal.

Pendidikan kebencanaan di tingkat persekolahan membantu anak-anak memainkan peranan penting dalam penyelamatan hidup dan perlindungan anggota masyarakat pada saat kejadian bencana. Menyelenggarakan pendidikan tentang resiko bencana ke dalam kurikulum sekolah sangat membantu dalam membangun kesadaran akan isu tersebut di lingkungan masyarakat. Sebagai tambahan terhadap peran penting mereka di dalam pendidikan formal, sekolah juga harus mampu melindungi anak-anak dari suatu kejadian bencana alam. Investasi dalam memperkuat struktur gedung sekolah sebelum suatu bencana terjadi, akan mengurangi biaya/anggaran jangka panjang, melindungi generasi muda penerus bangsa, dan memastikan kelangsungan kegiatan belajar-mengajar setelah kejadian bencana.

Pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah merupakan dua prioritas utama untuk dilakukan, sebagai aksi Kerangka Kerja Aksi Hyogo yang telah diadopsi oleh 168 negara. Pengintegrasian pendidikan tentang resiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan secara nasional dan penyediaan fasilitas sekolah yang aman dan menyelamatkan juga merupakan dua prioritas yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu negara menuju Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goal*).

Sasaran utama kampanye ini adalah mempromosikan integrasi pendidikan tentang resiko bencana dalam kurikulum sekolah di negara-negara yang rawan bencana alam dan mempromosikan konstruksi yang aman dan penyesuaian gedung sekolah yang mampu menahan bahaya. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dengan cara mempromosikan praktek terbaik yang menunjukkan bagaimana bermanfaatnya pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah bagi masyarakat yang rentan. Berupaya melibatkan para pelaku pada berbagai tingkatan untuk menyampaikan pesan kampanye tersebut. Mendorong kepekaan anak-anak sekolah, orangtua, para guru, para pengambil kebijakan di tingkat lokal hingga internasional, dan organisasi

kemasyarakatan untuk mempengaruhi kebijakan tentang pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Kampanye ditujukan kepada murid sekolah dasar dan menengah, para guru, pembuat kebijakan pendidikan, orangtua, insinyur dan ahli bangunan. Selain itu juga ditujukan kepada lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab atas isu manajemen bencana, mendiknas, para pemimpin politik di tingkat nasional, pembuat keputusan di masyarakat, dan otoritas lokal. Pesan yang bisa disampaikan antara lain:

- (1) pendidikan tentang resiko bencana menguatkan anak-anak dan membantu membangun kesadaran yang lebih besar isu tersebut di dalam masyarakat;
- (2) fasilitas bangunan sekolah yang bisa menyelamatkan hidup dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari suatu kejadian bencana alam; dan
- (3) pendidikan tentang resiko bencana dan fasilitas keselamatan di sekolah akan membantu negara-negara menuju ke arah pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Hasil yang diharapkan adalah pemerintah pusat dan daerah: (1) menanamkan investasinya dalam fasilitas bangunan sekolah tahan bencana dan mengarahkan kurikulum pendidikan tentang resiko bencana secara nasional; (2) meningkatkan kesadaran sebagai dampak positif adanya pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah; dan (3) peningkatan aksi dan penggunaan praktek-praktek yang baik untuk mengerahkan koalisi dan kemitraan, membangun kapasitas sumberdaya yang ada untuk mengadakan pelatihan pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Ada pengalaman menarik tentang peran anak-anak dalam mengurangi korban tsunami Desember 2004. Seorang gadis kecil dari Inggris bernama Tilly yang mendapatkan pelajaran tanda-tanda tsunami dari guru Geografinya telah menyelamatkan banyak orang yang sedang berlibur di pantai barat Thailand. Seorang anak laki-laki kecil bernama Anto yang tinggal di Pulau Simeulue mendapatkan pelajaran dari kakeknya tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi di laut. Bersama seluruh penghuni pulau itu, mereka berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Kedua kisah tersebut diangkat ke dalam film pendek sebagai materi kampanye UN/ISDR.

### **Pendidikan Lingkungan Hidup: Integrasi PRB dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah**

Sesungguhnya pada tahun 1986, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memasukkan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH) ke dalam pendidikan formal. Di sini PKLH diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penyampaian bahan ajar tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan.

Di tahun 1996 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2004 tercatat 192 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan.

Sejalan dengan itu, telah terbit *Memorandum Bersama* antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No.

0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996.

Lantas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Demikian juga LSM maupun perguruan tinggi tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Kemudian, pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK Bersama nomor: Kep No 07/MenLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata pelajaran yang telah ada.

Akhirnya, dengan digulirkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, maka prinsip integrasi ini diakomodasi melalui Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). PBKL adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada tingkat persekolahan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.

Pendidikan Lingkungan Hidup banyak diadopsi di tingkat persekolahan di Jawa Barat sebagai salah satu PBKL. Sejatinya Pendidikan Lingkungan Hidup (*environmental education*) adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru [UN - Tbilisi, Georgia - USSR (1977) dalam Unesco, (1978)].

PLH memasukkan aspek afektif yaitu tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable*). Pencapaian tujuan afektif ini biasanya sukar dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu memasukkan metode-metode yang memungkinkan berlangsungnya klarifikasi dan internalisasi nilai-nilai. Dalam PLH perlu dimunculkan atau dijelaskan bahwa dalam kehidupan nyata memang selalu terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Perbedaan nilai tersebut dapat mempersulit untuk *derive the fact*, serta dapat menimbulkan kontroversi/pertentangan pendapat. Oleh karena itu, PLH perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

Dari sisi inilah, maka pengurangan resiko bencana (PRB) dalam pendidikan di sekolah dapat dimplementasikan. Sebagai misal, silabus PLH SMA/SMK di Jawa Barat baik secara implisit maupun eksplisit telah mendeskripsikannya. Jadi, secara formal, PRB diintegrasikan dengan PLH. Namun mata-mata pelajaran lainnya pun dapat pula mengintegrasikannya sepanjang relevan dengan Standar Kompetensi (SK) maupun Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran yang bersangkutan.

## Penutup

Akhirnya, semua pihak wajib berupaya mengurangi resiko bencana yang dimulai dari sekolah. Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam hal ini para siswa dan guru, para pemimpin masyarakat, orangtua, maupun individu yang tertarik dengan pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi lokal/regional/nasional/internasional, sektor swasta dan publik untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan media juga diperlukan untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam rangka kampanye pendidikan publik secara terus-menerus dan dalam konsultasi publik di segenap lapisan masyarakat. 